

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran praktik prostitusi di Indonesia, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat itu sendiri. Masyarakat modern dengan berbagai kompleksitas, kemajuan teknologi dan industrialisasi, sebagian masyarakatnya berfikir pragmatis. Hal ini mendorong adanya bisnis illegal ekonomi atas pemenuhan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan pribadi, sebagian masyarakat menempuh mempertahankan status perkawinannya dengan pemenuhan jasa seks komersial yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya praktik prostitusi di kota-kota besar dan kabupaten yang merupakan daerah transit.

Perkembangan kota membawa konsekuensi-konsekuensi daya tarik tertentu, misalnya dengan membanjirnya penduduk desa bermigrasi ke kota (urbanisasi). Dengan semakin padatnya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan laju ekonomi dapat mendorong pengangguran. Pengangguran dan alasan ekonomis lainnya dapat mendorong praktik prostitusi bermunculan, disamping pola pikir pragmatis yang didorong oleh gaya hidup kota yang glamor. Dalam tatanan moral dan harkat martabat kemanusiaan, praktik prostitusi selalu menjadi masalah yang harus dicari solusinya, namun realitasnya praktik ini selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Pelacuran merupakan profesi tertua di dunia yang sulit dihilangkan selama ada peluang dan permintaan dari masyarakat pengguna, akan memicu timbulnya penawaran atau ketersediaan jasa tersebut. Meskipun berbagai kecaman moral, sanksi sosial dan penertiban aparat untuk mempersempit ruang gerak pelacuran, praktik prostitusi tetap terjadi bahkan upaya petugas di lapangan sepertinya tidak banyak berarti untuk mencegah makin menjamurnya praktik prostitusi tersebut (Suyanto, 1997: 45, dalam Christiana, 2002).

Di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Semarang, bisnis pelacuran cenderung semakin meningkat dan menjadi bagian dari kegiatan turisme bagi pihak-pihak yang membutuhkan penyaluran hasrat seks. Dengan berkembangnya keberadaan bisnis prostitusi ternyata tidak dapat dipungkiri berkembangnya pula keberadaan usaha-usaha mikro dan kecil. Dengan demikian keberadaan lokalisasi tidak hanya dibutuhkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk menjalankan usaha (core product), namun juga masyarakat sekitar sudah terlanjur menggantungkan kehidupannya pada bisnis turunan (accessory product) berupa penawaran jasa-jasa seperti losmen, tempat penginapan, hotel, parkir, laundry, salon, jasa panti pijat, spa (tempat kebugaran), penyedia PSK dan makelarnya serta keamanan. Disamping itu berkembang pula penyediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti restauran, bar, caffee, warung, toko kelontong dan pedagang keliling.

Kehidupan masyarakat di wilayah lokalisasi dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan lokalisasi. Keberadaan lokalisasi dapat “menyerap tenaga kerja” misalnya mulai dari pedagang makanan dan minuman keliling atau yang menetap, penjual pakaian dan perawatan kewanitaan, tukang parkir, petugas keamanan (preman), perias salon kecantikan, penyedia tempat-tempat spa (perawatan kebugaran), penyedia jasa panti pijat, pelayan (waiters) yang mengantarkan minuman kepada pelanggan, penyedia jasa laundry, dan pengusaha toko kelontong, serta penyedia PSK lainnya. Dengan berjalannya waktu diakui atau tidak, bahwa penghasilan mereka sangat bergantung terhadap keberadaan lokalisasi. Oleh karena itu penutupan dan penggusuran Lokalisasi tidak mudah untuk dilakukan.

Dampak keberadaan lokalisasi tidak selamanya berdampak “positif” terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar lokalisasi. Stigma negatif yang selalu diberikan terhadap seseorang tinggal di sekitar lokalisasi adalah mereka merasa malu dan terkucilkan. Seseorang yang ditanya tentang tempat tinggalnya yang berada di sekitar lokalisasi akan merasa malu ketika menyebutkan tempat tinggalnya yang sebenarnya. Kemungkinan besar

masyarakat yang tinggal di luar lokalisasi menganggap orang yang tinggal di sekitar lokalisasi sebagai “orang yang kurang baik” perilakunya, walaupun mereka tidak terkait langsung dengan bisnis yang ada di lingkungannya. Masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar lokalisasi kurang bahkan tidak mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma sosial serta norma agama yang menentang adanya praktik prostitusi.

Berkaitan dengan anggapan masyarakat tentang eksistensi lokalisasi yang masih menjadi bahan perdebatan, maka perlu dilakukan studi deskriptif tentang realitas lokalisasi dan bagaimana masyarakat bisa memandang lokalisasi tak sekedar dari kaca mata agama juga melihat fenomena prostitusi sebagai sebuah bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan yang berdampak sosial ekonomi dari prostitusi itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini akan menyoroti kajian dampak ekonomi PSK dan masyarakat sekitar lokalisasi atas kebijakan penutupannya oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah kegiatan penelitian Kajian Dampak Ekonomi PSK dan Masyarakat Sekitar Lokalisasi Atas Kebijakan Penutupannya Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan lokasi di Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keberadaan PSK dan Masyarakat sekitar Lokalisasi pasca penutupannya?
- 2) Profesi apa yang cocok untuk mantan PSK dan masyarakat sekitar Lokalisasi?
- 3) Strategi apa yang pantas dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut penutupan lokalisasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan, adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi keberdayaan PSK dan Masyarakat sekitar Lokalisasi pasca penutupannya.
- 2) Untuk mengetahui profesi yang pantas bagi mantan PSK dan masyarakat sekitar lokalisasi.
- 3) Untuk mengetahui strategi apa yang sesuai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut penutupan lokalisasi.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari penyusunan “Kajian Dampak Ekonomi PSK dan Masyarakat Sekitar Lokalisasi Atas Kebijakan Penutupannya Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur” ini yaitu:

- 1) Tersusunnya identifikasi keberdayaan PSK dan masyarakat sekitar lokalisasi pasca penutupannya
- 2) Teridentifikasinya alih profesi mantan PSK dan masyarakat sekitar lokalisasi
- 3) Tersusunnya rekomendasi strategi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut penutupan lokalisasi

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Berikut ini adalah lingkup kegiatan Analisis Kajian Dampak Ekonomi atas Kebijakan Penutupan Lokalisasi di 5 (lima) daerah di Jawa Timur, meliputi:

- 1) Identifikasi keberdayaan PSK dan Masyarakat sekitar Lokalisasi pasca penutupannya
- 2) Identifikasi alih profesi mantan PSK dan Masyarakat sekitar Lokalisasi
- 3) Tersusunnya rekomendasi strategi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai tindak lanjut penutupan lokalisasi